

KEMISKINAN DAN PENGEMBANGAN MODEL KREDIT MIKRO BAGI PEREMPUAN MISKIN DI KOTA YOGYAKARTA

M.Lies Endarwati, Penny Rahmawaty, Musaroh
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
lies_endarwati@yahoo.com; penny_rahmawaty@yahoo.com; musyasani@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini pertama menyusun profil perempuan miskin pedagang pasar tradisional kota Yogyakarta. Kedua, mengembangkan model layanan kredit mikro bagi perempuan miskin pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta, terutama kaitannya dengan faktor kebutuhan akan modal.

Untuk memperoleh data seperti itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang disesuaikan untuk mengembangkan model layanan kredit mikro. Untuk memotret kondisi perempuan miskin pedagang tradisional digunakan pendekatan kuantitatif berupa menyebarkan kuesioner dan wawancara mendalam. Target yang diharapkan dari penelitian ini adalah terdokumentasinya profil perempuan miskin pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Terakhir, tersusunnya model layanan kredit mikro yang efektif, cocok, bagi perempuan miskin pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta terutama kaitannya dengan faktor memenuhi kebutuhan akan modal.

Kata Kunci: kredit mikro, perempuan miskin.

Pendahuluan

Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia adalah perempuan, dan tidak kurang dari 6 juta dari mereka adalah kepala rumah tangga miskin dengan pendapatan rata-rata dibawah 10,000 per hari. Untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarga, umumnya mereka bekerja pada sektor informal—perdagangan dan jasa, sektor pertanian—buruh tani, dan buruh pabrik. Mereka sulit mendapatkan akses sumberdaya termasuk sumberdaya keuangan seperti kredit dari lembaga keuangan yang ada karena dianggap tidak layak, lokasi

terpencil, tidak ada penjamin, yang sebagian persoalan ini juga terkait dengan isu gender (Zulminarni, 2004).

Persoalan kemiskinan perempuan bukan hanya sekedar persoalan akses terhadap sumberdaya keuangan semata. Persoalan perempuan miskin adalah persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal. Ketimpangan gender dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kondisi utama yang mengantarkan perempuan pada kemiskinan yang berkepanjangan. Paling tidak ada lima aspek yang saling berhubungan yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan yaitu: *kesejahteraan, akses sumberdaya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol.*

Mengapa lembaga kredit mikro untuk pemberdayaan ekonomi perempuan? Pemerintah RI mencanangkan tahun 2005 sebagai Tahun Kredit Mikro Nasional. Pencanaan ini sebagai sambutan positif dari gagasan global yang juga mencanangkan 2005 sebagai tahun Kredit Mikro Internasional (*the year of microfinance*). Gagasan pentingnya kredit mikro untuk kaum perempuan tentu tidak terlepas dari kebijakan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa memastikan tersedianya kesempatan yang sama di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antara laki-laki dan perempuan, adalah instrumen penting untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan.

Dewasa ini, untuk konteks Indonesia, setidaknya ada 2 permasalahan mendasar yang berkaitan dengan isu perempuan dan kredit mikro untuk usaha kecil penduduk miskin. *Pertama*, adanya dua pendapat yang berbeda mengenai kebutuhan modal bagi usaha mikro dan kecil. Hasil penelitian Bank Indonesia (2004) menyebutkan bahwa kelompok UMKM memang tidak, atau kurang berminat untuk memperoleh bantuan dana dari perbankan. Hanya 32 % dari UMKM yang menyatakan memerlukan bantuan modal dari pinjaman bank dan hanya 76 % dari 32 % menyatakan pernah meminta pinjaman kredit dari perbankan. *Kedua*, gairah pemerintah pusat terhadap isu Kredit Mikro belakangan ini sangatlah positif, yang ditandai dengan perencanaan tahun Kredit Mikro pada tahun 2005 dilanjutkan dengan dukungan regulasi dan pemberian bantuan modal, sayangnya, program pemberdayaan UMKM melalui kredit mikro

oleh pemerintah itu terkesan netral gender. Kenyataan ini berimplikasi pada strategi penyusunan program dan institusi keuangan mikro sebagai mediumnya.

Bagaimana dengan kebijakan Pemerintahan Kota Yogyakarta mengenai Kredit Mikro dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan? Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin Kota Yogyakarta sebesar 89.818 jiwa atau 26.685 KK. Permasalahan lain yang dihadapi Pemkot Yogyakarta, tahun 2009, berkaitan dengan penduduk miskin, diantaranya: (a). Masih rendahnya kualitas SDM penduduk miskin. (b). Masih kurangnya akses permodalan bagi kelompok penduduk miskin. (c). Masih kurangnya fasilitasi pemasaran produk. (d). Masih kurangnya kesadaran penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidup melalui program transmigrasi. (e). Kurangnya motivasi penduduk miskin untuk merubah kehidupannya. Dengan kondisi dan permasalahan tersebut, maka tantangan yang dihadapi Pemkot Yogyakarta pada tahun 2009 adalah menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan: (a). Meningkatkan ketrampilan penduduk miskin melalui kursus-kursus ketrampilan. (b). Meningkatkan bantuan modal bagi kelompok-kelompok usaha penduduk miskin. (c). Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders guna memfasilitasi pemasaran. (d). Meningkatkan motivasi dan ketrampilan sebagai bekal bertransmigrasi. (e). Meningkatkan pembinaan rohani untuk membuka pola pikir menuju kehidupan yang layak.

Bila dilihat lebih dalam kebijakan Pemkot Yogyakarta, khususnya yang mengangkut permasalahan pemberdayaan perempuan miskin di pasar-pasar tradisional maka lebih tidak terlihat lagi programnya. Selama ini masalah pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Yogyakarta diatur oleh 3 Perda. *Pertama*, Perda No.3 Tahun 1992 tentang Pasar. *Kedua*, Perda No.4 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar. *Ketiga*, Perda No.5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pasar. Artinya belum ada kebijakan berbasis gender dari Pemkot yang menyentuh pelaku ekonomi di Pasar Tradisional yang mayoritas adalah perempuan.

Karena itu, kegiatan paling relevan guna menunjang program Pemkot Yogyakarta dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender adalah perumusan sistem atau model pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pembentukan lembaga kredit mikro yang secara

khusus diperuntukan bagi pelaku ekonomi mikro perempuan yang sangat miskin dan tidak mempunyai akses untuk memperoleh kredit perbankan dengan berbagai alasan.

Melalui penelitian ini akan dideskripsikan kondisi ekonomi perempuan Kota Yogyakarta, fokus pada mereka yang melakukan usahanya di pasar-pasar tradisional. Dari profil mengenai perempuan pedagang di pasar tradisional Kota Yogyakarta dengan segala persoalannya ini, diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan Model Layanan Kredit Mikro bagi Perempuan Miskin Pedagang Pasar Tradisional di Kota Yogyakarta.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana profil perempuan miskin pedagang pasar tradisional Kota Yogyakarta.?
- b. Permasalahan apa saja yang dihadapi perempuan miskin pedagang pasar tradisional Kota Yogyakarta?
- c. Bagaimana model layanan kredit mikro bagi perempuan miskin pedagang pasar tradisional Kota Yogyakarta dan faktor apa yang mempengaruhi layanan kredit mikro?

Tinjauan Pustaka

Keterlibatan perempuan di dunia kerja, baik di desa maupun di kota, dari waktu ke waktu, semakin memperlihatkan kontribusinya bagi pembangunan ekonomi di daerahnya. Dari banyak studi menyebutkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja, terutama sebagai pedagang, dipengaruhi tidak hanya oleh taraf pendidikan yang meningkat tetapi juga terdesak oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Usaha-usaha mikro, seperti perdagangan, pengolahan makanan, industri berteknologi rendah, konveksi dan jasa adalah jenis-jenis usaha yang banyak dijalankan perempuan baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari sistem produksi keluarga (Dewayanti & Chotim, 2004).

Dari tinjauan literatur tentang pemberdayaan perempuan diketahui bahwa masih sedikit penelitian penting mengenai masyarakat bawah (*primary research at the grassroots level*) untuk memahami tentang apa sebenarnya arti pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari para perempuan. Selain itu ada banyak definisi, sekaligus berbagai macam dimensi pemberdayaan yang mengarah pada indikator yang berbeda, serta interpretasi dan hasil evaluasi yang berbeda pula (Kabeer, 2001; Mahmud, 2003).

Menurut Kabeer (1999:2), konsep pemberdayaan merujuk pada *power as determining choice and ability to choose*, yaitu kekuasaan untuk menentukan pilihan dan kemampuan untuk memilih. Lebih jelasnya, konsep ini berarti proses dengan mana mereka yang tidak berkemampuan untuk memilih menjadi berkemampuan untuk itu. Konsep pemberdayaan dalam aktivitas pembangunan telah sejak lama ditekankan pada kesejahteraan perempuan (Sen, 2000 dalam Mahmud, 2003). Menariknya, telah ada pergeseran penekanan terhadap konsep pemberdayaan bagi para perempuan, yaitu dari penerimaan pasif: pemberdayaan para perempuan dalam kaitannya dengan kecenderungan superioritas pria, ke arah penekanan pentingnya peranan agen-agen pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan semua keluarga, khususnya perempuan.

Dalam hal kredit mikro untuk perempuan, konsep pemberdayaan harus mengarah pada konsep pemberdayaan pasif dan aktif mengingat perempuan sering harus berhadapan dengan ketidakadilan kaum pria. Definisi pemberdayaan yang sesuai dengan kerangka kerja kredit mikro menurut Mayoux' (1998) adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk mendeskripsikan proses dimana orang yang tidak berdaya menjadi sadar akan situasi mereka sendiri kemudian mengorganisasikan diri mereka secara kolektif, ditujukan untuk memperoleh akses yang lebih terhadap pelayanan publik serta untuk pengembangan tingkat ekonomi mereka (Rajivan, 2001).

Perempuan, Usaha, dan Kredit Mikro

Ada 60 persen dari 30 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah adalah perempuan. Nasib mereka belum menggembirakan. Kendala terbesar yang dihadapi perempuan pengusaha kecil berkisar pada pemasaran dan permodalan. Perempuan pengusaha Indonesia sering menjadi kelompok yang dimarjinalkan (Kompas, 10/10/03). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari sekitar 2 juta unit usaha mikro dan 194.546 unit usaha kecil di sektor pengolahan, jumlah pelaku usaha laki-laki 1,3 juta orang (59,21 persen), sedangkan jumlah pelaku usaha perempuan sekitar 896.047 (40,79 persen).

Perempuan pengusaha kecil dapat diklasifikasikan dengan berbagai macam cara, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kasus tertentu, klasifikasi dibuat untuk melihat gambaran perbedaan hambatan yang dihadapi oleh perempuan sebagai pengusaha kecil. Oleh karena itu, pengklasifikasian dilakukan berdasarkan kepemilikan unit usaha dan peran perempuan dalam pengelolaan usaha. Perempuan yang memiliki unit usaha sendiri, terlepas dari unit usaha yang dimiliki suami atau anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini perempuan menjadi pemilik dan pengelola usaha tersebut. Perbedaan kepemilikan unit usaha dan posisi perempuan dalam pengelolaan usaha ini berpengaruh pada kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan di dalam memulai, menjalankan, dan mengembangkan usahanya.

Argumen yang lebih rasional tentang mengapa kredit mikro lebih baik ditujukan pada perempuan, dapat digali dari strategi bertahan hidup perempuan, di sektor informal, yang juga berkaitan dengan karakteristik umum perempuan yang selama ini dikenal. Menurut Rose (1992), karakteristik perempuan lebih mampu bertahan terhadap kemiskinan yang mereka derita dibandingkan laki-laki. Hal ini karena perempuan mempunyai cara yang jauh lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa dalam suatu program kredit mikro yang sama, perempuan mempunyai tendensi lebih baik dibanding pria dalam hal pengembalian pinjaman serta dalam hal dampak

jangka panjang program terhadap pembangunan sumber daya manusia. Mayoux (1999) juga berpendapat bahwa akses terhadap kredit mikro untuk perempuan mempunyai efek penting terhadap proses pemberdayaan perempuan. Menurutnya kredit mikro mengimplikasikan tiga hal, yaitu keberlanjutan keuangan yang mandiri, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan para feminis. Di sini Mayoux menekankan pula bahwa program kredit mikro untuk perempuan mengarah pada pemberdayaan ekonomi para perempuan tersebut yang hal ini akan lebih jauh mengarah pada pemberdayaan sosial, politik dan hukum dan pada akhirnya berkontribusi pada pembentukan *social capital* atau modal sosial yaitu dengan melalui berkembangnya jaringan antar mereka (Mahmud, 2003).

Upaya Pemerintah dalam memformulasi dan mengimplementasikan beberapa mekanisme atau program kredit mikro yang khusus ditargetkan untuk para perempuan diantaranya adalah: Program Kredit Keluarga Sejahtera (KUKESRA), Program Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL), Program Kredit Mikro untuk Penguatan Perempuan Pengusaha Kecil dan Mikro yang dikoordinasikan oleh Asosiasi Pendamping Perempuan Pengusaha Kecil (ASSPUK) dan Pengembangan Ekonomi Perempuan Usaha Kecil (PPEUK).

Rumah tangga yang memperoleh pinjaman dari kredit mikro, relatif lebih baik dalam hal kesejahteraan dibanding rumah tangga yang tidak mendapat pinjaman kredit mikro. Selain meningkatkan pendapatan keluarga, kredit mikro juga memberi inspirasi/membantu penerimanya untuk menciptakan suatu usaha produktif baik untuk diri mereka sendiri maupun anggota keluarga mereka. Selain itu, kredit memungkinkan penerimanya untuk mempunyai standar konsumsi yang lebih tinggi (Mahmud, 2003).

Sementara itu, banyak argumen yang menyatakan bahwa meningkatnya akses perempuan dalam memperoleh pendapatan juga akan meningkatkan kemampuan mereka untuk turut serta dalam pengambilan keputusan di keluarga. Dengan pinjaman dari kredit mikro, para perempuan mempunyai kesempatan untuk bersama-sama dengan suami mereka mengambil keputusan untuk hal-hal yang penting dalam keluarga seperti pengalokasian keuangan rumah tangga,

pendidikan anak-anak mereka, keluarga berencana (KB), dan juga partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.

Metodologi Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini selain menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan quasi kuantitatif juga metode penelitian dan pengembangan yang disesuaikan atau dimodifikasi untuk mengembangkan model layanan kredit mikro. Pendekatan quasi kuantitatif mengolah semua informasi atau data yang diwujudkan dalam bentuk angka dan dianalisis berdasarkan kualitatif.

Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel penelitian terdiri atas tiga variabel yaitu manajemen keuangan, layanan kredit mikro dan keberhasilan usaha. Variabel manajemen keuangan mempunyai empat indikator, yaitu permodalan (x_1), menghitung Laba/Rugi (x_2), mengatur angsuran (x_3) dan mencatat keuangan pengeluaran dan pemasukan (x_4). Sedangkan Variabel Layanan Kredit Mikro memiliki empat indikator yaitu jenis kredit (y_1), syarat kredit (y_2), besarnya pinjaman/kredit (y_3) dan proses pencairan (y_4). Terakhir, Variabel keberhasilan usaha mempunyai tiga indikator yaitu omset penjualan (y_5), laba bersih yang diperoleh (y_6) dan ketepatan waktu mengangsur (y_7)

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua perempuan pedagang di pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Ada 31 pasar di Kota Yogyakarta dengan jumlah pedagang sebesar 10.620 pedagang perempuan (70% dari 15.172). Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 200 pedagang perempuan dengan berbagai jenis dagangan dan usia. Jumlah 200 orang ini diambil dari hanya 10 pasar terbesar di Kota Yogyakarta. Masing-masing: pasar Beringharjo 20 orang;

Demangan 21 orang; Karangwaru 15 orang; Kotagede 33 orang; Kranggan 16 orang; Ngasem 20 orang; Patuk 20 orang; Prawirotaman 20 orang; Sentul 15 orang; dan Pasar Serangan 20 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pokok yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner dan wawancara, selain itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder berupa buku maupun dokumentasi. Data dokumentasi dibutuhkan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi jumlah perempuan pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Beberapa Perda Kota Yogyakarta mengenai pasar tradisional.

Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang pengembangan model layanan kredit mikro bagi perempuan miskin pedagang pasar tradisional kota Yogyakarta dan faktor yang mempengaruhinya yakni Manajemen keuangan dan Keberhasilan usaha

Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan untuk uji coba model penilaian adalah model persamaan struktural.(SEM) yang didasarkan pada pertimbangan bahwa pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan konstruk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan model persamaan struktural dapat menjawab sejauhmana pengukuran yang dilakukan dapat merefleksikan suatu konstruk yang hendak diukur. Selain itu, model persamaan struktural dapat mengukur validitas konstruk dan reliabilitas instrumen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Pasar Tradisional di Kota Yogyakarta

Menurut data statistik Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta (2007) menyebutkan bahwa jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 31 pasar, baik besar maupun kecil. Dari 31 pasar ini di kelompokkan ke dalam kelas-kelas, mulai pasar kelas I sampai kelas V.

Pasar kelas I adalah pasar dengan komponen bangunan-bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat regional. Yang masuk kategori kelas ini adalah Pasar Giwangan.

Klasifikasi kelas II adalah pasar dengan komponen bangunan-bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat kota. Yang masuk kategori kelas ini adalah Pasar Beringharjo.

Klasifikasi kelas III adalah pasar dengan komponen bangunan-bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat wilayah bagian kota. Yang masuk kategori kelas ini adalah Pasar Kranggan, Pasar Demangan, Pasar Kotagede, Pasar Sentul, Pasar Serangan, Pasar Pathuk, Pasar Ngasem, Pasar Terban, dan Pasar Klitikan Pakuncen.

Klasifikasi kelas IV adalah pasar dengan komponen bangunan-bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat lingkungan. Yang masuk kategori kelas ini adalah Pasar Ngasem, Pasar Terban, dan Pasar Legi, Pasar Lempuyangan; Pasar Ciptomulyo; Pasar Karangajen; Pasar Prawirotaman; Pasar Kembang; Pasar Tunjungsari; dan Pasar Pingit.

Klasifikasi kelas V adalah pasar tanpa atau dengan komponen bangunan-bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dan melayani tingkat perdagangan blok. Yang masuk kategori kelas ini adalah Pasar Gedongkuning, Pasar Senen, dan Pasar Pujokusuman, Pasar Gading;

Pasar Karangwaru; Pasar Sanggrahan; Pasar gendeng; Pasar Ngadikusuman; Pasar Sawo; Pasar Ledok Gondomanan; Pasar Semaki; dan Pasar Suryobrantan

Profil Perempuan Miskin Pedagang di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta

Dilihat dari faktor usia rata-rata berusia 40 tahun ke atas sebanyak 37,5% sedangkan yang berusia lanjut (di atas 60 tahun) ternyata juga cukup banyak mencapai 12%. Bila dilihat dari tingkat pendidikan menyebutkan bahwa sebagian besar responden tidak tamat SD (25,5%) atau hanya tamat SD (32%). Tetapi yang tamat SMA juga relatif banyak ada 21%.

Yang menarik dari perempuan pedagang di pasar tradisional kota Yogyakarta, bahwa mereka umumnya bukan orang Kota Yogyakarta. Ada 71% pedagang yang bertempat tinggal di luar kota Yogyakarta. Penduduk kota Yogyakarta hanya sebesar 29%. Kenyataan ini sangat penting diketahui agar lebih selektif dan detail dalam proses pemberdayaan ekonomi perempuan kota Yogyakarta.

Modal dan Aktivitas Berdagang

Jenis dagangan yang dijual para perempuan di pasar tradisional pada umumnya berupa makanan dan minuman, kemudian sayuran, sembako dan daging, ikan, ayam serta buah-buahan. Kemudian berdasarkan lamanya berjualan di pasar, menyebutkan bahwa umumnya responden sudah berjualan lebih dari 20 tahun (43,5%).

Jumlah omzet yang dimiliki para perempuan pedagang di pasar tradisional relatif kecil. Ada 36,5% yang mempunyai omzet antara Rp.100 ribu sampai Rp.500 ribu. Asal modal usaha, umumnya menyebutkan milik sendiri (48,5%) atau dibantu keluarga sebesar 22%. Tetapi yang berasal dari rentenir juga besar (23,5%). Keuntungan yang diperoleh umumnya sebesar Rp. 10 ribu sampai Rp. 30 ribu per hari.

Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan kebutuhan akan modal menyebutkan bahwa pada umumnya responden membutuhkan modal. Jika dilihat menurut usia mereka diketahui bahwa yang paling banyak membutuhkan modal adalah responden yang berusia 30 sampai 50 tahun. Dari data primer menyebutkan bahwa jumlah mereka yang membutuhkan modal sebesar 67,5%. Bila dilihat dari pendidikan menyebutkan bahwa tidak ada relevansi pendidikan dengan kebutuhan modal, tetapi yang lulusan SD sangat membutuhkan modal dibandingkan lulusan SMP maupun SMA.

Permasalahan lain yang dihadapi perempuan pedagang di pasar tradisional diantaranya berbagai pungutan baik resmi maupun tidak resmi. Yang resmi atau biaya retribusi yang dikenakan kepada pedagang oleh Pemkot adalah sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta tahun 1992 tentang Retribusi Pasar. Besarnya pungutan resmi ini bervariasi antara pedagang disesuaikan dengan lokasi atau prasarana tempat jualan. Yang berada di emper atau di halaman pasar berkisar Rp. 300,- sampai Rp.600,- sementara yang mempunyai tempat sendiri atau Los berkisar Rp.1200,- dan yang berupa kios sebesar Rp.2200,- per hari.

Harapan-harapan yang Diinginkan

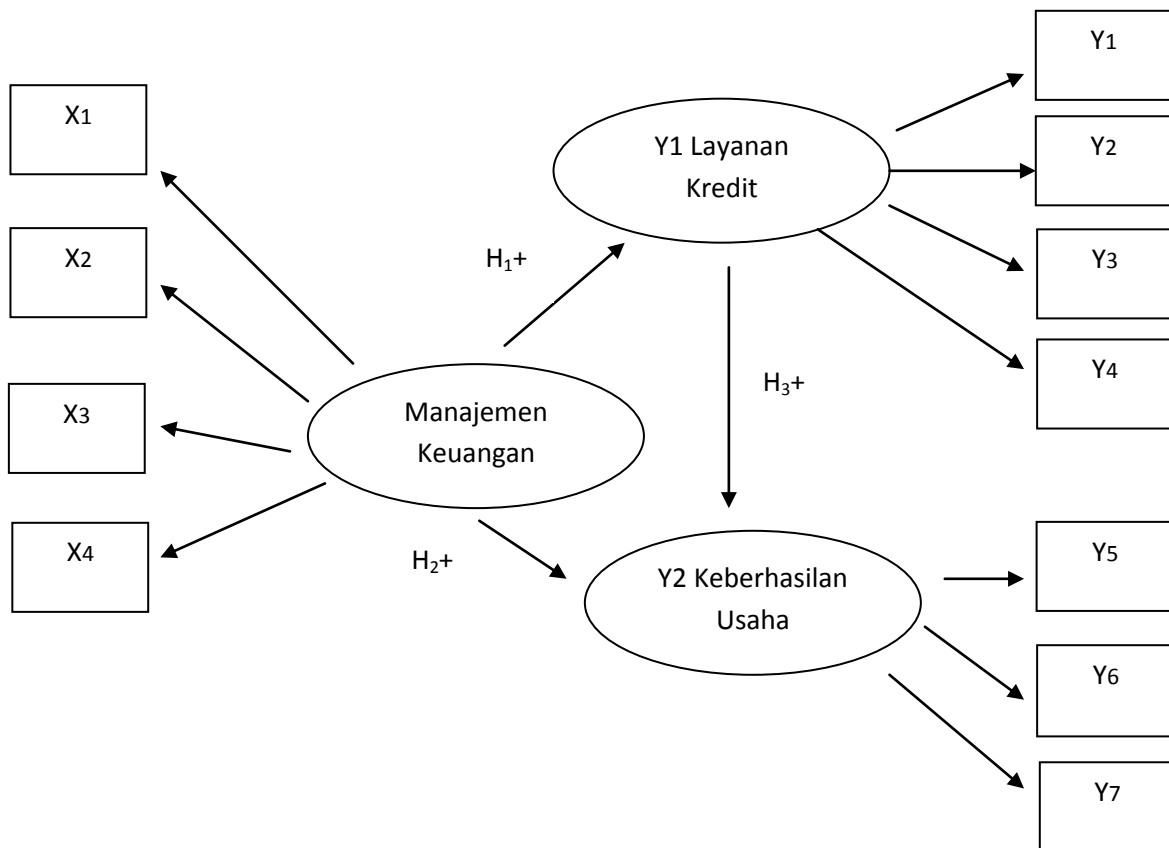
Harapan responden terhadap pendidikan anak-anaknya sangat positif yakni berharap anak-anaknya dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi setidaknya dari pendidikan orangtuanya. Ada 75% responden berharap agar anak-anaknya dapat menempuh sekolah setinggi mungkin.

Harapan responden terhadap pekerjaan anak-anaknya kelak cukup menarik. Mereka berharap agar anak-anaknya tidak bekerja seperti mereka tetapi menjadi pegawai tetap di kantor baik swasta maupun negeri. Ada 45,5% responden yang mengharapkan anaknya menjadi pegawai tetap kantoran. Dapat dikatakan bahwa pekerjaan mereka sekarang bukanlah pekerjaan yang menjanjikan, tetapi menariknya kenapa mereka tetap bertahan hingga puluhan tahun.

Harapan responden terhadap pemerintah Kota Yogyakarta, yang utama adalah harga barang murah atau berharap pemerintah menurunkan harga-harga barang kebutuhan sehari-hari yang dirasakan sangat tinggi. Kedua mengharap adanya bantuan modal.

Uji Model Layanan Kredit Mikro bagi Perempuan Pedagang Pasar Tradisional Kota Yogyakarta

Berdasarkan kajian tentang variabel dan hubungan sebab akibat antar variabel, maka dapat dibuat diagram konseptual model hubungan manajemen keuangan, layanan kredit dan keberhasilan usaha, seperti yang ditunjukkan Gambar 1. Gambar tersebut menunjukkan bahwa manajemen keuangan mempunyai efek langsung pada layanan kredit, dan keberhasilan usaha.



Gambar 1 Hubungan Struktural Manajemen Keuangan, Layanan kredit dan Keberhasilan usaha.

Analisis Kesesuaian Model *Path Analisis* (SEM)

Sebelum dilakukan uji atas hubungan kausal antar konstruk, terlebih dahulu perlu diketahui indeks kelayakan (*goodness of fit index*). Uji yang digunakan untuk mengestimasi model *fit*, meliputi nilai *Chi-Square*, nilai-*p* /GFI/ AGFI, dan RSMEA.

Dari analisis diketahui nilai-GFI $0,94 > 0,90$ / AGFI $0,91 > 0,90$, dan nilai RSMEA = $0,059 < 0,08$ memiliki nilai signifikansi dan hanya *chi-square* nilainya $70,60 < 0,05$ tidak signifikan, sehingga dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa *fit* dengan model teoritis yang diestimasi memenuhi kriteria yang disyaratkan.

Pengujian Hubungan Struktural Manajemen Keuangan, Layanan kredit dan Keberhasilan usaha

Pengujian hubungan struktural dilakukan melalui uji signifikansi koefisien jalur dengan uji *t* pada alpha 5% atau digunakan nilai kritis t_{tabel} sebesar 1,960 sebagai *cut-of value*.

Dari gambar 1 di atas diketahui ada 3 jalur (*path*) yang mencerminkan 3 hubungan yang akan diuji. Jalur pada gambar tersebut ditunjukkan anak panah searah (*arrow*) dari satu variabel ke variabel lain. Simbol anak panah satu arah ini mencerminkan hubungan kausal (pengaruh) variabel eksogen dengan variabel endogen.

Hasil pengujian hipotesis terlihat pada tabel berikut

Tabel 1. Pengujian Hipotesis

| Arah jalur | Koefisien Jalur | T hitung | Kesimpulan |
|---|-----------------|----------|------------|
| Manajemen Keuangan → Layanan Kredit | 0,42 | 5,17 | Signifikan |
| Manajemen Keuangan → Keberhasilan Usaha | 0,41 | 3,74 | Signifikan |
| Layanan Kredit → Keberhasilan Usaha | 0,31 | 2,98 | Signifikan |

T tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 1,96

Berdasarkan hasil estimasi persamaan struktural seperti tersaji pada tabel 1, diperoleh persamaan sebagai berikut :

- 1) Struktur 1 : Jalur manajemen keuangan terhadap Layanan kredit
Layanan kredit(Y_1) = 0,42* Manajemen keuangan(X)
Berdasarkan dari besaran nilai koefisien jalur, diketahui bahwa manajemen keuangan berpengaruh sebesar 0,42 terhadap layanan kredit

- 2) Struktur 2 : Jalur manajemen keuangan terhadap keberhasilan usaha
Keberhasilan usaha (Y_2) = 0,41* Manajemen keuangan (X)
Berdasarkan dari hasil besaran koefisien jalur, diketahui bahwa manajemen keuangan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha sebesar 0,41.

- 3) Struktur 3 : Jalur layanan kredit terhadap keberhasilan usaha.
Keberhasilan usaha (Y_2)=0,31* Layanan kredit (Y1)
Berdasarkan dari hasil besaran koefisien jalur, diketahui bahwa layanan Kredit berpengaruh sebesar 0,31 terhadap keberhasilan usaha.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian tentang kemiskinan dan pengembangan model layanan kredit mikro bagi perempuan Kota Yogyakarta, yang pada kesempatan ini fokus pada para perempuan pedagang di pasar tradisional. Dengan tersusunnya profil perempuan pedagang pasar tradisional di kota Yogyakarta, diharapkan dapat memberikan masukan model layanan kredit mikro seperti apa yang sesuai dengan kondisi perempuan miskin kota Yogyakarta dan faktor yang mempengaruhinya.

Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa jumlah pasar tradisional di Kota Yogyakarta kurang lebih ada 31 pasar, terdiri dari pasar yang berkelas 1 ada satu pasar (Giwangan). Kemudian pasar berkelas 2 berjumlah ada 1 (Beringharjo);

pasar berkelas 3 ada 9 tempat (; pasar berkelas 4 ada 8 tempat; dan pasar berkelas 5 ada 12 tempat.

Usia perempuan pedagang pasar tradisional pada umumnya antara 30-50 tahun. Kemudian status perkawinan mereka umumnya menikah. Pendidikan mereka rata-rata lulusan SD atau tidak tamat SD. Asal tempat tinggal mereka pada umumnya berasal dari luar kota Yogyakarta, artinya banyak penduduk luar Yogyakarta yang berjualan di pasar-pasar kota Yogyakarta. Sumber modal pertama mereka pada umumnya adalah modal sendiri atau dibantu keluarga. Kemudian jenis dagangan yang mereka jual pada umumnya makanan dan minuman kemudian sayur-sayuran.

Persoalan utama yang mereka hadapi antara lain kebutuhan akan modal. Prinsipnya mereka mau dan berharap diberi modal serta siap mengembalikan sesuai dengan jumlah bunga yang diterapkan. Dengan catatan diharapkan bunga tidak terlalu tinggi.

Harapan mereka terhadap anak-anaknya adalah dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan dapat bekerja yang lebih baik seperti bekerja di kantor. Harapan mereka terhadap pemerintah, seyogyanya pemerintah dapat menurunkan atau menstabilkan harga, dan mengharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan modal.

Diagram jalur hasil pengujian model konstruk layanan kredit mikro, manajemen keuangan dan keberhasilan usaha dalam skor baku diperoleh $\chi^2=70,60$ ($P<0,050$) ; $GFI=0,94 > 0,90$ dan $RMSEA=0,059 < 0,08$. Dua dari tiga ukuran kecocokan, yaitu GFI dan RMSEA, menunjukkan bahwa model konstruk dalam penelitian ini cocok dengan model yang diperoleh dari data lapangan, sedangkan χ^2 menunjukkan ketidakcocokan.

Berdasarkan dua ukuran kecocokan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model konstruk yang didisain dalam penelitian ini dapat diterima. Hal ini didukung dengan koefisien jalur dari semua variabel bernilai positif dan signifikan ($p<0,050$).

Rekomendasi

Berpijak pada hasil penelitian mengenai perempuan miskin pedagang pasar tradisional Yogyakarta, maka ada beberapa hal yang dapat disampaikan disini sebagai bahan masukan (rekomendasi)

Pertama, sudah sangat mendesak perlunya penelitian tindakan (Action Research) untuk memberdayakan para perempuan pedagang pasar tradisioanal Kota Yogyakarta, terutama dalam manajemen keuangan, yang selanjutnya memudahkan dalam mendapatkan layanan kredit mikro dan dapat lebih meningkatkan keberhasilan usaha.

Kedua, untuk meningkatkan keberdayaan para perempuan miskin penjual atau pedagang pasar tradisional kiranya sangat patut dipikirkan terbentuknya sebuah lembaga kredit mikro yang berfungsi utama dalam memberikan layanan adalah memberdayakan perempuan pedagang pasar tradisional dalam hal permodalan.

Daftar Pustaka

- Asmorowati, Sulikah, 2005, "Dampak Pemberian Kredit Mikro untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian Model Grameen Bank di Indonesia" (Makalah seminar).
- BPS, 2007, *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2006/2007*, Yogyakarta: Pemkot Yogyakarta & BPS Kota Yogyakarta.
- Dinas Pengelolaan Pasar Yogyakarta, 2007, *Profil Pasar Tradisional Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: Dinas Pengelola Pasar Yogyakarta.
- Firdaus, Muhammad, 2005, "Aspek Keadilan Gender pada Lembaga Kredit Mikro," *Kompas*, 7 Maret.
- Firdaus, Muhammad, 2007, "Pasar Tradisional Perempuan Pedagang Kecil-Mikro," *Kompas*, 16 November.
- Hendrayana, Rachmat & Bustaman, Sjahrul, 2007, "Fenomena Lembaga Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan (Hasil penelitian belum di publikasikan).
- Herwana, Budi; Wardoyo & Oswari, Teddy, 2005, "Lembaga Keuangan Mikro: Model Organisasi & Pemanfaatan Teknologi Informasi, (makalah seminar)

- Kantor Meneg PP, 1997, *Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Wanita Pedagang Kecil Eceran di Pasar Tradisional*. Jakarta: Kantor Meneg PP.
- Kayanamedia, "Perempuan Pelaku Ekonomi Kecil: Bertahan di tengah Guncangan," *Majalah Kalyanamedia*, Edisi 1 No.3 Oktober.
- Kuncoro, Mudrajat, 2008, "Grameen Bank & Lembaga Keuangan Mikro," dalam *Harian Kedaulatan Rakyat*. 2 Agustus.
- Laporan Utama, 2008, "UMKM Jadi Primadona Entaskan Kemiskinan," *Gemari*, Edisi 90 Tahun IX/Juli.
- Novirianti, Dewi, 2005, "Pemberdayaan Hukum Perempuan untuk Melawan Kemiskinan", *Jurnal Perempuan*, Vol. 42.
- Pemkot Yogyakarta, 2008, Peraturan Walikota Yogyakarta No.27 Tahun 2008, Tentang: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009.
- Presiden RI, 2008, "Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," (Teks Pidato Presiden SBY dalam rangka hari Koperasi)
- Purwanto, Agus Erwan, 2006, "Strategi Budaya untuk Pemulihan Usaha Kecil dan Menengah di Yogyakarta Pasca Gempa," *Populasi*, Vol. 17 No.1 Tahun 2006.
- Situmorang, Jannes, "Model Perkreditan & Komitmen Bank dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM," (makalah seminar)
- Smeru, 2001, *Studi Kredit Kecil Perkotaan di Kab. Kulonprogo*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Tukiran, Hardyastuti, Suharmini, Nuh, Muhammad, 2002, "Problematika Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin", *Populasi*, Vol. 13 No.1, Tahun 2002.
- Zulminarni, Nani, 2008, "Lembaga Keuangan Mikro dalam Kerangka Pemberdayaan Perempuan Miskin," (makalah workshop)